

DINAMIKA POLITIK IDENTITASDI SULAWESI TENGGARA (STUDI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DANWAKIL GUBERNUR TAHUN 2018)

Zhuhur Ma'ruf Ali
NPP 30.1380

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: zhuhurmaruf234@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Astika Ummy Athahirah, S. STP., M. Si

ABSTRACT

Problems/Background: Political movements in Southeast Sulawesi Province have long used the land-island system. This political practice provides an opportunity for candidates to carry out their interests through the similarity of their identities. The practice of mainland islands in local political movements in the election for the governor and deputy governor of Southeast Sulawesi in 2018 made ethnic issues a vehicle for representation for prospective candidates to attract the masses at the momentum of the 2018 Southeast Sulawesi Governor Election. As explained above, the researcher is interested in took the title "The Political Dynamics of Southeast Sulawesi Identity (Study on the 2018 Governor and Deputy Governor Elections)". **Purpose:** This study aims to determine the influence of identity politics and what factors cause identity politics to be brought together with ethnic issues. In this study using identity politics theory from Pierre Van Den Bergh where there are two dimensions. The dimensions in question are constructionist and instrumentalist. **Method:** The research method used is descriptive qualitative. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. **Results/Findings:** The results of the study show that the implementation of the election for the Governor of Southeast Sulawesi shows that there are still issues related to identity politics and there are still installations carried out by parties that pair representatives from mainland and islands, this is done in order to attract or mobilize the public to vote pairs of candidates who come from their area or are native to the area. Identity that is owned by a person or group is obtained either from constructivism and identity instrumentalism that is owned or that exists in the surrounding community. The factor that influences the occurrence of identity politics is the power factor. Then the instrument used is in the form of social media to bring up the issue of identity politics, but ethnic instruments as a political force are not so highlighted. **Conclusion:** Based on this research, it can be concluded that the dynamics of identity politics in Southeast Sulawesi in the 2018 Governor and Deputy Governor Elections are very complex.

Keywords: Political Dynamics, Identity Politics, Governor Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Dalam pergerakan politik di Provinsi Sulawesi Tenggara telah lama memakai sistem daratan kepulauan. Praktik politik ini memberikan peluang kepada kandidat untuk membawa kepentingannya melalui kesamaan identitasnya. Praktik daratan kepulauan dalam pergerakan politik lokal pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara di tahun 2018 menjadikan isu suku sebagai pembawa terhadap representasi bagi calon kandidat untuk menarik massa pada momentum Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018. Seperti yang telah di jelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Dinamika Politik Identitas Sulawesi Tenggara (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018)”. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik identitas serta faktor apa saja yang menyebabkan politik identitas dibawa bersama isu suku. Pada penelitian ini menggunakan menggunakan teori politik identitas dari Pierre Van Den Bergh dimana terdapat dua dimensi. Dimensi yang dimaksud tersebut adalah konstruksionis dan instrumentalis. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa masih adanya isu yang di bawah terkait politik identitas dan masih adanya pemasangan yang dilakukan oleh partai yang memasang dari perwakilan daratan dan kepulauan, hal ini dilakukan agar menarik atau memobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan calon yang berasal dari daerahnya atau putra asli daerah. Identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok baik di peroleh dari konstruktivisme dan instrumentalisme identitas yang dimiliki atau yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya politik identitas ini yaitu dari faktor kekuasaan. Kemudian Instrumen yang digunakan yakni berupa media sosial untuk memunculkan isu politik identitas, tetapi instrumen etnis sebagai kekuatan politik tidak begitu di tonjolkan. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian ini mampu disimpulkan bahwa dinamika politik identitas di Sulawesi Tenggara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 terjadi dengan sangat kompleks.

Kata Kunci: Dinamika Politik, Politik Identitas, Pemilihan Gubernur

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik identitas bisa diartikan secara sederhana sebagai sebuah strategi politik yang berfokus kepada sebuah perbedaan yang memanfaatkan sebuah ikatan primordial. Politik identitas juga bisa dikatakan sebagai alat untuk berpolitik di dalam kelompok baik etnis, agama, suku, atau bahkan yang lain yang memiliki sebuah tujuan tertentu, dan bisa untuk alat sebagai penunjuk sebuah jati diri dari kelompok tersebut (Ariyani, 2021:31).

Damanik (2020:205) mengemukakan bahwa ”politik identitas berkaitan dengan perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis maupun agama“. Perjuangan

politik identitas pada dasarnya adalah perjuangan kelompok atau orang-orang pinggiran, baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Bagi para pembela dan kritikus melihat bahwa politik identitas, umumnya mengacu pada politik yang didasarkan gagasan esensial atau gagasan tetap tentang identitas. Kritik terhadap politik identitas dapat dilihat dari hasil yang menganut identitas esensial sebagai politik yang terbatas dan lemah karena klaim yang bergantung pada status minoritas yang mirip ras dan etnis (Bernstein, 2002:532).

Indonesia adalah negara yang menjadi wilayah jalur sutra, berbilang-etnis hidup didalam negeri khatulistiwa ini, baik etnis dari luar ataupun dalam negeri itu sendiri. Salah satu etnis yang mendominasi negeri tersebut adalah etnis Tionghoa. Secara historis etnis Tionghoa masuk ke Indonesia pada abad 206 SM – 220 M melalui jalur perdagangan. Bangsa Tionghoa datang bersamaan dengan ekspedisi yang dilakukan oleh laksamana Cheng Ho sebanyak tujuh kali (Yuanzi, 2005:25).

Pembentukan identitas dapat terbentuk baik secara parsial maupun secara interaksial. hal inilah yang akan melahirkan perubahan sosial ekonomi, sosial politik, sosial itu sendiri dan sosial budaya. Identitas etnis dan agama adalah dua hal yang menjadi elemen perubahan sosial. Prosesterjadinya politik identitas keagamaan akan melahirkan dampak langsung maupun tidak langsung pada perubahan sosial begitupun sebaliknya (Sukanto, 2010:13). Konstruksi politik identitas di Indonesia telah muncul dan menemukan kekuatannya semenjak zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Persamaan identitas sebagai warga negara yang merdeka melahirkan sikap nasionalisme yang tinggi dari masyarakat untuk menunjukkan politik identitas mereka dalam menyelenggarakan praktek ketatanegaraan (Lestari, 2018:22).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyebab timbulnya konflik-konflik yang berhubungan dengan keanekaragaman masyarakat yang lebih ke arah kepentingan politik tertentu. Sama halnya yang terjadi di Indonesia ketika salah satu kandidat dalam suatu pemilihan yang terus menerus saling memberi ujaran kebencian dengan menyebarkan berita-berita hoax yang memuat isu SARA (Tutukansa, 2022:21). Hal inilah yang secara tidak langsung telah menjadialah satu permasalahan pada politik yang berhubungan dengan identitas pada masyarakat.

Etnis merupakan pihak yang memiliki peranan besar yang berbasis massa dengan elit lokal yang dapat menggerakkan serta memobilisasi pengikut atau publik sehingga memberikan suaranya untuk putra daerah yang ikut mencalonkan (Al-Farisi, 2018:84). Jika dipetakan maka bisa diperoleh etnik yang terbagi dalam dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan. Di mana etnis yang mendominasi di daratan adalah Tolaki dan Bugis, dan di kepulauan adalah etnik Muna dan Buton. Dalam pergerakan politik di Provinsi Sulawesi Tenggara telah lama memakai sistem daratan kepulauan di mana para pasangan calon berasal dari daratan dan kepulauan. Semenjak era pemerintahan dari (alm) La Ode Kaimuddin pada saat memimpin sebagai Gubernur ke-7 di Sulawesi Tenggara pada Tahun 1992, pada periodenya ia yang notabenenya adalah etnis dari kepulauan (Muna) telah mencari kolega politiknya yang berstatus sebagai masyarakat Kota Kendari yang merupakan etnis Tolaki.

Gubernur saat ini Ali Mazi yang merupakan etnis dari Buton sebelumnya ia juga pernah menjabat satu periode sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2008. Masa kepemimpinan beliau dari periode pertama ke periode kedua terjadi rentan waktu selama dua periode, keadaan ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa beliau dapat menjadi gubernur selama dua periode yang rentan waktunya cukup jauh.

Jika melihat pilkada 2018 di sini pertarungan antar pasangan calon masih menerapkan istilah dari daratan-kepulauan.

1. Pasangan calon Ali Mazi – Lukman Abunawas (kepulauan-daratan)
2. Pasangan calon Asrun – Hugua (daratan-kepulauan)
3. Pasangan calon Rusda – Syafei Kahar (daratan-kepulauan)

Praktik politik ini memberikan peluang kepada kandidat untuk membawa kepentingannya melalui kesamaan identitasnya. Praktik daratan kepulauan dalam pergerakan politik lokal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tahun 2018 menjadikan isu etnis sebagai pembawa terhadap representasi bagi calon kandidat untuk menarik massa pada momentum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Pasangan Alimazi-Lukman yang merupakan etnis dari Buton dan Tolaki yang dimana mayoritas penduduknya berasal dari Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, dan Konawe Utara. Dapat dilihat berdasarkan isi tabel bahwa pasangan Alimazi-Lukman memenangkan rekapitulasi suara cukup banyak dari lawannya di daerah-daerah tersebut. Dari peristiwa diatas kitadapat mengambil kesimpulan bahwasannya pasangan Ali Mazi-Lukman memenangkan pemilu dikarenakan penerapan politik identitas dari masyarakat Sulawesi Tenggara dan di sini kita dapat melihat bagaimana dinamika politik identitas yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah kajian “Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis” oleh Adiwilaga, et.al (2017) yang menunjukkan bahwa identitas etnis memainkan peran penting dalam proses politik di Indonesia. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana pemilihan umum (Pemilu) secara tidak langsung mempengaruhi dinamika politik identitas etnis di negara ini. Kemudian kajian “Pengaruh politik identitas terhadap pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013” oleh Irfan Zharfandy (206) yang menunjukkan bahwa sebagian besar etnis di Sulawesi Selatan mampu mengikuti kultur etnis Makassar yang tidak terlalu melihat pemimpin yang asal etnisnya harus sama. Ketika praktiknya di lapangan pengaruh etnis masih muncul tetapi seiring dengan waktu yang berjalan mengalami perubahan di pandangan etnis. Ada pula kajian “Geopolitik Pemilihan Presiden Tahun 2019 Sebuah Survey Politik Identitas. Menurut Prespektif Ulama di Kalimantan Tengah” yang dilakukan oleh Anwar dan A Syar’I F Liadi (2019) yang menunjukkan bahwa ulama di Kalimantan Tengah memiliki peran yang signifikan dalam pemilihan presiden tahun 2019. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ulama memiliki pengaruh kuat terhadap preferensi politik pemilih melalui penekanan pada identitas agama dan panduan moral dalam memilih pemimpin. Selanjutnya kajian

“Pilkada dan politik identitas multikulturalisme di Luwu Timur (studi terhadap kemenangan Thoriq Husler dalam pilkada serentak 2015)” oleh Fitri Hafsari Zainudin (2017) yang menunjukkan bahwa pada pelaksanaannya etnis tidak banyak memiliki peran, penyebabnya sentimen etnisnya relatif sedikit. Para pemilih pun memilih pemimpin di luarnya etnisnya. Terakhir kajian “Menangkal Politik Identitas: Analisis Kemenangan HT-Zadi pada Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015” oleh Sahrul Pora (2021) yang menyatakan bahwa kemenangan pasangan calon HT-Zadi dalam pemilihan bupati Kepulauan Sula tahun 2015 dapat dijelaskan oleh strategi mereka dalam menangkali politik identitas yang sering kali memecah-belah masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pasangan calon tersebut berhasil membangun platform kampanye yang berfokus pada isu-isu pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, tanpa terjebak dalam retorika politik identitas.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan salah satu upaya baru dalam memahami dinamika politik identitas di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018. Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengeksplorasi peran politik identitas etnis, agama, dan strategi penangkalnya dalam politik di Indonesia, penelitian ini memperkaya pemahaman kita dengan fokus pada wilayah Sulawesi Tenggara yang memiliki konteks politik dan sosial yang unik. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor-faktor politik identitas, termasuk identitas etnis dan agama, mempengaruhi preferensi pemilih dan dinamika politik di wilayah ini. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman kita tentang strategi penangkal politik identitas dalam konteks Sulawesi Tenggara. Sementara penelitian sebelumnya telah mengungkapkan strategi yang efektif dalam menangkali politik identitas, penelitian ini memperluas cakupan penelitian tersebut dengan menganalisis konteks spesifik Sulawesi Tenggara dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika politik identitas di wilayah tersebut.

Dengan menggabungkan konteks lokal Sulawesi Tenggara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018, serta faktor-faktor politik identitas yang teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman kita tentang dinamika politik identitas di tingkat regional. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan, politisi, dan akademisi dalam mengembangkan strategi politik yang inklusif dan memahami peran politik identitas dalam konteks Sulawesi Tenggara secara lebih komprehensif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika politik identitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan politik identitas dibawa bersama isu etnis pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan memakai pendekatan induktif. Dalam penelitian kualitatif

pengumpulan datanya diarahkan berdasarkan fakta yang didapat di dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Menurut Sugiyono (2013:7) “metode kualitatif disebut juga sebagai metode artistik dan interpretif dikarenakan mekanisme penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola serta data penelitian merupakan interpretasi dari data yang ditemukan di lapangan”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep politik identitas dari Pierre Van Den Bergh yang terdiri atas konstruksionis dan instrumentalisme. Pada penelitian kualitatif dalam mengumpulkan datanya dikerjakan dengan keadaan yang alami. Pada pengumpulan datanya dapat menggunakan data primer serta data sekunder. Informan penelitian berjumlah 8 orang yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Instrumen penelitain yakni peneliti itu sendiri. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP). MDAP merupakan teknik analisis data dengan pemrosesan data secara manual. Tahapan dalam MDAP disebut oleh Straus dan Glaser (1967) sebagai *theoretical sampling*.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menjelaskan faktor yang menjadi penyebab politik identitas muncul bersama isu dan bagaimana dinamika politik identitas yang dilakukan oleh pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis MDAP, didapatkan hasil yang berupa Memos Penelitian. Yang di dapatkan dari hasil Memos Penelitian tersebut adalah berupa empat kategori yaitu dinamika politik identitas, latar belakang pelaksanaan politik identitas, peran/isu politik identitas dalam pemilu, pelaksanaan politik identitas, serta faktor yang menyebabkan politik identitas pada pemilihan gubernur.

3.1 Dinamika Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

3.1.1 Etnis Sebagai Alat Memeroleh Suara (Momentum Politik)

Dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara bisa dilihat bahwa bukan hanya soal pemilih yang beragam, tapi kandidatnyapun mempunyai latar belakang etnisnya juga beragam, para pasangan calon merupakan perwakilan dari masing-masing etnis yang berada di Sulawesi Tenggara. Pasangan calon Ali Mazi – Lukman Abunawas yang merupakan perwakilan dari etnis Buton dan Tolaki, kemudian pasangan calon Asrun – Hugua yang merupakan perwakilan dari etnik Tolaki dan Buton, dan pasangan calon Rusda Mahmud - Syafei Kahar yang merupakan perwakilan dari etnis Bugis dan Muna.

Praktik politik ini memberikan peluang kepada kandidat untuk membawa kepentingannya melalui kesamaan identitasnya. Praktik daratan kepulauan dalam pergerakan politik lokal pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 menjadikan isu etnis sebagai pembawa terhadap representasi bagi calon kandidat untuk menarik massa pada momentum pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik daratan kepulauan itu sendiri masih ada, hanya masih dalam keadaan tertutup dan masih semua para pasangan calon memilih

wakilnya dari etnis yang berbeda dalam rangka untuk memobilisasi suara, dalam praktik politiknya juga para partai pengusung sangat mempertimbangkan untuk memasang calon karena masih kentalnya sistem daratan kepulauan. Dari sini juga kita dapat melihat bahwasannya peran suku masih cukup besar dalam pemilu khususnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Politik identitas memang masih ditunjukkan namun tidak terlalu memperlihatkan atau menonjolkan etnis yang digunakan sebagai alat kontestasi politik, karena hal tersebut sangat sensitif jika konstruksi di daerah yang majemuk dengan adanya mayoritas dan minoritas yang tinggal di wilayah tersebut dan saling menghargai satu sama lain serta masih adanya kesadaran masyarakat yang tidak bisa dipengaruhi oleh pernyataan identitas etnis, dimana masyarakat yang peduli terhadap demokrasi politik dan keadaan daerahnya tidak akan mudah terpengaruhi oleh identitas calon melainkan akan melihat dan mencari tahu visi-misi dan kinerja dari pasangan calon tersebut. Masyarakat juga terpengaruhi oleh paslon putra asal daerahnya karena di janjikan untuk di berikan jabatan kekuasaan dan adanya pembangunan di daerahnya, hal inilah yang menjadi poin penting terjadinya politik identitas itu sendiri.

3.1.2 Peran/isu Munculnya Politik Identitas Etnik dalam Pemilu (Munculnya Isu)

Upaya dibangunnya politik identitas dalam Pilkada dimana pendekatan situasional cenderung digunakan dalam Pilkada untuk dapat mengetahui situasi-situasi di lingkungan masyarakat dan dapat menarik perhatian masyarakat kepada calon untuk memberikan hak suaranya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pola strategi yang digunakan oleh pasangan calon, dimana calon dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Munculnya identitas-identitas yang dikonstruksi sebagai pembeda untuk menentukan mana bagian dari “diri” atau “orang lain” dalam hubungannya dengan kepentingan politik, etnik adalah bukti nyata hadirnya politik identitas. Etnis mayoritas dalam konteks politik lokal menurut pandangan geopolitik sangat memiliki pengaruh besar dalam memperoleh suara masyarakat. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, visi dan misi dari pasangan calon menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya, disamping hal tersebut kedekatan dengan masyarakat yang menjadi pertimbangan pemilih dalam memilih. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan situasional untuk meraih posisi kekuasaan. Dinamika politik identitas di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pilkada Tahun 2018 dengan masyarakat multikultural menjadikan pasangan calon dan elit politik maupun tim pemenangan yang ada dibelakangnya harus memiliki strategi atau upaya membangun identitas-identitas masyarakat, bukan hanya masyarakat mayoritas tetapi juga masyarakat minoritas yang mendiami wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada saja isu politik identitas yang muncul atau dibangun pada saat pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara dan tidak bisa dipungkiri adanya upaya membangun identitas etnis yang dilakukan oleh partai maupun tim pemenangan pasangan calon untuk memperkenalkan pasangan calon kepada masyarakat untuk memperoleh dan memobilisasi suara dari masyarakat. Situasi ini mendorong setiap

politisi berupaya membangun pendekatan mengenai identitas yang dominan di masyarakat untuk mencapai tujuannya.

3.2 Faktor Penyebab politik identitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

Berdasarkan teori dari Pierre Van Den Bergh bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya politik identitas baik dari konstruksionis maupun instrumentalisme. Yang menonjol disini yaitu pada instrumentalisme dimana pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 tim pemenangan pasangan masih memanfaatkan identitas yang di miliki oleh pasangan calon sebagai alat untuk mendapatkan suara masyarakat (pemilih) dengan pendekatan instrumentalisme sesuai dengan situasi masyarakat. Sehingga politik identitas menjadi sangat subur dibangun dalam proses Pilkada yang di lakukan secara intes dalam bentuk intraksi simbolik untuk memobilisasi dukungan masa. Kemudian Instrumen yang digunakan yakni berupa media sosial untuk memunculkan isu politik identitas, tetapi instrumen etnis sebagai kekuatan politik tidak begitu di tonjolkan untuk menghindari konflik antar masyarakat.

Terkait dengan posisi etnis dalam Pilkada suatu wilayah yang mempunyai keberagaman etnik, biasanya akan menonjol dalam Pilkada karena ketika dalam proses memilih seorang pemimpin masyarakat akan melihat latar belakang yang dimiliki aktor tersebut baik dari etnis, dan lain sebagainya. Ada yang menyatakan bahwa faktor etnis sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku pemilih dalam proses Pilkada. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa faktor etnis tidak terlalu mempengaruhi perilaku pemilih dalam proses Pilkada. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara masih adanya instrumen identitas sebagai alat pemenangan, namun hal tersebut tidak begitu di perhatikan atau di tonjolkan sebagai alat pemenangan pasangan calon.

3.2.1 Etnis di Manfaatkan untuk Memobilisasi Dukungan untuk Pemenang (Mobilisasi Pendukung)

Politik identitas sering digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik. Politik identitas dijadikan sekedar alat manipulasi bagi penguasa untuk menggalang suara guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya. Latar belakang dari seorang politisi dapat mempengaruhi elektabilitas atau popularitas di antara masyarakat. Karakteristik menjadi bagian dari cerminan dari seorang politisi, karakter menjadi poin yang penting bagi politisi untuk menggalang suara masyarakat karena masyarakat akan melihat sifat, karakter, dan bagaimana rekam jejak politisi tersebut dalam memimpin.

Pilkada tingkat lokal memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak para elit politik memanfaatkan etnis dalam memobilisasi pemenangan calon yang diusung. Dimana masyarakat Sulawesi Tenggara merupakan replika dari Indonesia yang terdapat berbagai macam etnis baik mayoritas maupun minoritas sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dengan orang lain, maka saat itu juga identitas etnis mempromulasikan keberadaan atau sesuatu diluar persamaan-persamaan tersebut.

Dalam Pilkada pendekatan instrumentalis yang digunakan sebagai salah satu instrumen kekuatan dalam memobilisasi dukungan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam konteks Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018

yang mayoritas masyarakatnya adalah Suku Tolaki dan Buton. Maka tidak bisa dipungkiri terdapat kalangan elit yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga etnis dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui masyarakat yang primitif atau masih tradisional dan memegang teguh karakteristik yang dimilikinya.

Pada pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 masih didapati tim pemenangan pasangan masih memanfaatkan identitas yang dimiliki oleh pasangan calon sebagai alat untuk mendapatkan suara masyarakat (pemilih) dengan pendekatan instrumentalisme sesuai dengan situasi masyarakat. Sehingga politik identitas menjadi sangat subur dibangun dalam proses Pilkada yang dilakukan secara intens dalam bentuk intraksi simbolik untuk memobilisasi dukungan masa. Selain itu masih kentalnya ego keetnisan dari masyarakat, masyarakat ingin yang menjadi pemimpin itu harus orang dari asal daerahnya sendiri, tetapi tidak dapat kita pungkiri sudah menjadi sifat dasar manusia untuk berkuasa. Tetapi dari hasil wawancara tersebut juga bahwa masih ada juga money politik yang timbul walaupun hanya berupa barang ini juga menjadi temuan yang didapat oleh penulis bahwa bukan hanya identitas suku yang dibawah, melainkan ada permainan *money* politik dalam memobilisasi pendukung.

3.2.2 Etnis sebagai Alat Memenangkan Kampanye

Sentimen etnis seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligus menjadi problem dalam lingkup demokrasi. Tak terkecuali pada kontestasi pemilu tingkat lokal atau pilkada, etnis dijadikan sebagai salah satu kategori di dalam sosiologi politik yang berkembang sejalan dengan perubahan pola politik identitas. Penguatan identitas diri dari seorang pasangan calon dilakukan dengan membangun identitas diri secara intens di masyarakat. Politik identitas yang berangkat dari *base on identity* (identitas) dan *base on interest* (kelompok kepentingan) dijadikan instrumen untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Selanjutnya perkembangan politik identitas saat ini telah mengalami pergeseran dari yang sesungguhnya karena identitas bukan digunakan untuk pengenalan atau ciri khas dari individu itu sendiri tetapi lebih kepada kepentingan elit politik, dan hal ini masih digunakan dalam kegiatan politik seperti Pilkada Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemilih bisa memilih berdasarkan pada karakteristik kandidat pada salah satu calon daripada melihat dari sisi anggota partai yang diikuti. Sehingga disini masyarakat dapat melihat profil dari calon kandidat dari sebuah partai ketimbang melihat dari partai yang diikuti. Masyarakat terkadang lebih tertarik kepada latar belakang dari seorang calon politisi, oleh karena itu apapun medianya seperti media online atau cetak pasti menuliskan mengenai profil dari calon politisi tersebut.

Masyarakat akan tetap memilih pemimpin berdasarkan etnis sekalipun pasangan calon sedang dalam masalah, dari peristiwa tersebut membuktikan bahwa etnis masih sangat besar pengaruhnya untuk memenangkan kampanye dan masih kentalnya ego etnis dalam masyarakat Sulawesi Tenggara, yang tertanam didalam pikiran masyarakat yaitu yang menjadi seorang pemimpin harus dari sukunya tanpa memandang sisi lain yang lebih baik. Faktor yang menyebabkan hal tersebut dikarenakan kurangnya dewasanya masyarakat tentang demokrasi yang baik dan benar, kurangnya pendidikan politik yang didapatkan masyarakat dari pemerintah daerah setempat.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian mengenai dinamika politik identitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dapat dirangkum dalam beberapa poin. Pertama, dalam pemilihan tersebut, kandidat-kandidat yang beragam etnis menjadi perwakilan dari masing-masing kelompok etnis di Sulawesi Tenggara. Praktik politik ini memberikan peluang bagi kandidat untuk memanfaatkan identitas etnis mereka sebagai alat untuk memperoleh suara atau momentum politik. Praktik politik identitas ini masih terlihat dalam pemilihan tersebut, meskipun tidak terlalu menonjolkan etnis sebagai alat kontestasi politik. Hal ini disebabkan karena sensitivitas konstruksi identitas etnis di daerah yang memiliki mayoritas dan minoritas yang tinggal bersama serta adanya kesadaran masyarakat yang tidak mudah dipengaruhi oleh pernyataan identitas etnis semata. Masyarakat yang peduli terhadap demokrasi politik dan kondisi daerahnya cenderung melihat visi-misi dan kinerja dari pasangan calon sebagai faktor penentu pemilihan mereka.

Namun, peran suku atau etnis masih cukup besar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Identitas etnis masih dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi suara oleh para pasangan calon dan partai pengusung. Meskipun identitas suku menjadi faktor yang mempengaruhi, terdapat poin penting lain yang juga menjadi pertimbangan masyarakat, yaitu janji-janji terkait jabatan dan pembangunan di daerah asal pasangan calon. Munculnya politik identitas etnis dalam pemilihan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menonjol adalah pendekatan instrumentalisme, di mana tim pemenangan pasangan calon memanfaatkan identitas etnis sebagai alat untuk mendapatkan suara masyarakat. Penggunaan instrumen identitas tersebut tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi lebih cenderung digunakan dalam bentuk interaksi simbolik untuk memobilisasi dukungan massa.

Selain itu, sentimen etnis juga menjadi salah satu kekuatan dan masalah dalam kontestasi pemilu tingkat lokal seperti Pilkada. Identitas etnis digunakan sebagai instrumen politik untuk membangun identitas diri calon dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Meskipun terdapat pergeseran dalam pola politik identitas, identitas etnis masih memiliki pengaruh yang signifikan terutama dalam masyarakat yang memiliki keberagaman etnis.

Pada pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, terlihat bahwa etnis dijadikan alat untuk memenangkan kampanye. Meskipun terdapat masalah atau kontroversi yang melibatkan pasangan calon, masyarakat masih cenderung memilih pemimpin berdasarkan etnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa ego etnis masih kental dalam masyarakat Sulawesi Tenggara, di mana ada kepercayaan bahwa pemimpin harus berasal dari suku mereka tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih penting. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas, kompetensi, dan program kerja dapat menjadi faktor yang mendukung peran politik identitas etnis dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara. Jika masyarakat kurang teredukasi tentang pentingnya faktor-faktor non-etnis dalam memilih pemimpin, mereka cenderung lebih mengandalkan identitas etnis sebagai pertimbangan utama.

Selain itu, faktor historis dan konteks sosial juga dapat memengaruhi masyarakat dalam melihat politik identitas etnis sebagai faktor penentu pemilihan. Jika ada konflik

etnis sebelumnya atau ketegangan antar-kelompok etnis di daerah tersebut, maka politik identitas etnis cenderung menjadi lebih dominan dalam proses pemilihan.

Dalam hal ini, pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemilihan berdasarkan kualitas dan program kerja dapat membantu mengurangi pengaruh politik identitas etnis. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas tentang pentingnya melihat kemampuan, rekam jejak, dan visi calon pemimpin sebagai faktor penentu dalam memilih, daripada hanya berfokus pada identitas etnis semata.

Langkah-langkah untuk meningkatkan dialog antar-etnis, mempromosikan persatuan, dan mengatasi ketegangan etnis juga dapat membantu mengurangi pengaruh politik identitas dalam pemilihan. Masyarakat perlu diberikan kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang dapat mewakili kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat, tanpa memandang suku atau etnisnya. Pendidikan politik yang inklusif dan peningkatan kesadaran akan pentingnya mengedepankan kepentingan bersama di atas politik identitas etnis dapat menjadi langkah-langkah yang membantu mengurangi polarisasi politik yang didasarkan pada identitas etnis dalam konteks pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa masih adanya isu yang di bawah terkait politik identitas dan masih adanya pemasangan yang dilakukan oleh partai yang memasang dari perwakilan daratan dan kepulauan, hal ini dilakukan agar menarik atau memobilisasi masyarakat untuk memilih pasangan calon yang berasal dari daerahnya atau putra asli daerah. Identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok baik di peroleh dari kontruksitivisme dan instrumentalisme identitas yang dimiliki atau yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Dimana identitas daratan dan kepulauan sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dalam hal ini identitas etnis seringkali di kontruksi dan di instrumen sesuai keadaan dan tujuan para elit politik atau tim pemenangan dalam kontestasi Pemilu untuk memperoleh dukungan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya politik identitas ini yaitu dari faktor kekuasaan kemudian adanya keinginan dari pengusung untuk melahirkan sosok calon yang membawah nama daerah dan pasangan calon yang merupakan perwakilan dari daratan dan kepulauan. Kemudian Instrumen yang digunakan yakni berupa media sosial untuk memunculkan isu politik identitas, tetapi instrumen etnis sebagai kekuatan politik tidak begitu di tonjolkan untuk menghindari konflik antar masyarakat tetapi juga tidak menutup kemungkinan adanya inisiatif penggunaan identitas etnis yang menonjol pada identitas pasangan calon yang dimanfaatkan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis merekomendasikan supaya:

1. Penulis mengharapkan kedepannya jika ada pemilihan baik pemilihan gubernur maupun legislatif kepada setiap pasangan calon yang berpartisipasi dalam Pilkada dapat menciptakan persaingan yang sehat antar pasangan calon dan mengelola isu yang ada di masyarakat dengan baik, tidak saling menjatuhkan satu sama lain dan tidak menciptakan perpecahan di masyarakat dalam menjalankan pesta demokrasi.
2. Selain itu sangat penting adanya pendidikan politik bagi masyarakat apalagi untuk pemilu pemula untuk memberikan pandangan kepada masyarakat agar politik

identitas ini benar-benar hilang dalam tatanan sosial politik dan masyarakat tidak lagi memilikinya kesamaan identitas saja melainkan menjadi pemilih yang rasional

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga dalam proses dokumentasi tidak mendapatkan semua apa yang tertera di tiap indikator.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Dinamika Politik Identitas Sulawesi Tenggara (Studi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018) untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Tokoh Masyarakat Etnis Daratan dan Kepulauan, serta masyarakat yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad. 2011. Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan. *Jurnal Muwazah*. Vol 3 No 1: 328-329, Juli 2010
- Akinyetun, T. S. 2020. Identity Politics and National Integration in Nigeria: The Sexagenarian Experience. *African Journal of Inter/Multidisciplinary Studies*, 2(1), 114–126. <https://doi.org/10.51415/ajims.v2i1.856>
- Al-Farisi, L. S. 2018. Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 2, 77–90.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Ariyani Surya, D., & Noerzaman, A. (2021). Politik Identitas Dibalik Penggunaan Pilkada. *Oktobe*, 2(2). <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>
- Bashori, K. 2018. Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Bernstein, M. 2002. Identities and Politics. *Social Science History*, 26(3), 531–581. <https://doi.org/10.1017/s0145553200013080>
- Buchari, Sri A. 2014. *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Bungin, *Social Research Methods (Post-Qualitative)*, Edisi 1. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Damanik, E. L. 2020. Identity-Based Administrative Involution in Indonesia: How Political Actors and Community Figures Do It? *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020974015>
- Dhani, F. W. 2019. Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(1), 143. <https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6360>

- Habibi, M. 2017. Analisis Politik Identitas Di Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1(3), 1–22.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887>
- Laboddin, M. 2012. Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Lestari Sri, Y. 2018. Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 12.
<https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. 2014. politik identitas di kota mataram. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Nambo, A., & Puluhuluwa, M. 2005. Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik). *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 21(2), 262–285.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. CVALFABETA.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung, 2017).
- Sukanto, 2010. Politik Identitas (Suatu Kajian Awal dalam Kerangka dan interaksi “Lokalitas dan Globalisasi”). *Jurnal Sejarah dan Budaya Universitas Malang*. Vol.2
- Soenjoto, W. P. P. 2019. Eksploitasi Isu Plolitik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial Indonesia di Era 4.0. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 187–217.
- Suparlan, P. 2004. Hubungan Antar Suku Bangsa. KIK Press: Jakarta.
- Tutukansa, A. F. 2022. Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(1). <https://doi.org/10.20885/khazanah.voll4.iss1.art3>
- Yuanzhi, Kong, *Silang Budaya Tiongkok-Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2005).